

**PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DENGAN PENERAPAN MANAJEMEN
BERBASIS SEKOLAH
(Studi di SMPS Katolik Mater Inviolata Larantuka-Flores)**

Yustina

Hotner Tampubolon

hotnertampubolon@yahoo.com

ABSTRACT

The purpose of this research to describe the application of quality improvement strategies with MBS in Catholic Mater Inviolata Larantuka Junior High School. The subject of the research, the principal, the teachers, the school committee, and the school community. The research method is descriptive qualitative. Data collection is done with the interview techniques, observation and study of the documentation.

The results of the research are that: (1) Application of strategy: Continuous program planning, through programming each year of lessons; improvement of academic and non academic quality by streamlining learning time, improvement program and enrichment; empowering the professionalism of teachers and staff through professional development training; empowering potential learners through additional learning hours, learning assistance; cooperate with parents through regular meetings at the beginning, of the middle and end of the semester. (2) The role of the principal as: (a) Educator: foster, train teachers through various trainings. (b) Managers: planning and developing school programs. (c) Administrator: orderly administration of each task field. (d) Supervisor: supervise the performance of teachers and staff. (e) Leader: a democratic leadership. (f) Innovators: The new innovations; IT training program. (g) Motivators: motivate teachers, staff, students to develop potential. (3) The role of teachers: as implementing PAKEM-based teaching and learning activities. (4) The role of the school committee: realized in giving consideration to the host and the implementation of education policy, following up the aspirations of the community. (5) The role of the community through participation in program implementation, providing financial assistance, and personnel.

Keywords : Quality Improvement, School Based Management

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Secara yuridis model Manajemen Berbasis Sekolah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sitem Pendidikan Nasional, Pasal 51 ayat 1 menyatakan: Pengelolaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah. MBS adalah strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan yang merupakan hasil kebijakan desentralisasi otonomi pendidikan, lazim disebut School Based Management (SBM).

MBS merupakan model manajemen pengelolaan sekolah dan bertujuan untuk menjadikan sekolah lebih mandiri atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi) ; fleksibilitas, keleluasaan, yang lebih besar kepada sekolah dalam mengelola sumber daya; mendorong partipasi langsung warga sekolah, dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kan mutu pendidikan adalah melalui implementasi Manajemen Berbasis Sekolah, kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SMPS Katolik Mater Inviolata Larantuka, adalah salah satu lembaga pendidikan swasta yang merupakan milik yayasan Santo Gabriel Maumere Flores. Lembaga pendidikan ini memiliki banyak keunggulan baik akademik maupun non akademik. Peningkatan mutu SMPS Katolik Mater Inviolata Larantuka dapat diketahui dari perolehan jumlah siswa masuk (input), prestasi akademik dan non akademik. Prestasi akademik diketahui dari perolehan nilai ujian dan dari perolehan kejuaraan lomba mata pelajaran. Sedangkan prestasi non akademik diperoleh dari berbagai kejuaraan lomba yaitu, seni, pramuka dan olah raga. Input, output dan perolehan nilai rata-rata ujian nasional mencapai kelulusan 100 %.

Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dalam upaya untuk mengetahui strategi peningkatan mutu dengan penerapan MBS; sejauh mana peran kepala sekolah dan guru, komite sekolah dan masyarakat, serta dukungan dan hambatan dalam implementasi MBS untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMPS Katolik Mater Inviolata Larantuka. Dengan focus penelitian: strategi peningkatan mutu pendidikan, peran kepala sekolah, dan guru, peran komite sekolah dan masyarakat, dukungan dan hambatan dalam implementasi MBS .

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Peningkatan Mutu Pendidikan

Sagala (2011:170) berpendapat bahwa mutu pendidikan adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh jasa pelayanan pendidikan secara internal maupun eksternal yang kemampuannya memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat mencakup input, proses, dan output pendidikan.

Hasil prestasi dapat diukur melalui berbagai macam kegiatan, yaitu kegiatan lomba akademik, non akademik dan hasil ujian. Prestasi belajar ditunjukkan adanya perubahan mental dan sikap siswa, dalam menghadapi situasi di lingkungannya, selaras dengan pendapat Damayanti dan Mudjiono (2010: 45), prestasi belajar adalah suatu pencapaian tujuan pengajaran yang ditunjukkan dengan peningkatan kemampuan mental siswa. Peningkatan mutu pendidikan adalah serangkaian dari hasil yang dicapai satuan pendidikan yang dapat dijadikan tolok ukur dan standarisasi dari pencapaian tujuan pendidikan nasional yang meliputi input, proses dan output.

Dalam usaha meningkatkan kualitas/mutu pendidikan, guru dituntut mampu terlibat aktif dan maksimal sehingga tertantang untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme kerjanya sehingga mempunyai andil dalam meningkatkan mutu sekolah. Kurikulum hendaknya terus berkembang secara dinamis sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan jaman sehingga tujuan dapat tercapai secara maksimal. Sedangkan jaringan kerja sama sangat dibutuhkan, tidak terbatas pada lingkungan setempat melainkan dengan organisasi lain dan bersifat luas sehingga diharapkan keluaran (output) dapat terserap dalam dunia kerja.

Korelasi mutu dengan pendidikan, sebagaimana pengertian yang dikemukakan oleh Dzaujak Ahmad (1996:8), peningkatan mutu, adalah kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang ada di sekolah sehingga mencapai nilai tambahan terhadap komponen tersebut terhadap norma/komponen menurut standar yang berlaku. Standar pendidikan yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Standar Pendidikan Nasional digunakan sebagai standar yang harus terpenuhi dalam mengelola pendidikan di sekolah dengan menggunakan model manajemen yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Sementara menurut pandangan Zamroni (2007: 2) peningkatan mutu sangat berkaitan dengan target yang akan dicapai, proses untuk mencapai, dan faktor-faktor

yang terkait. Dalam peningkatan mutu faktor proses sangat berperan dalam mencapai kualitas hasil.

2. Pengertian Mutu Pendidikan

Menurut Sallis E (2011: 51) terdapat dua konsep tentang mutu, yaitu sebuah konsep yang absolut sekaligus relatif. Konsep Mutu yang absolut adalah mutu yang mempunyai idealisme tinggi dan berstandar tinggi yang harus dipenuhi, dengan sifat produk yang bergengsi tinggi. Sedangkan mutu yang relatif adalah suatu alat yang sudah ditetapkan dan harus memenuhi standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya pengertian yang lebih filosofis ke arah mutu pendidikan disampaikan oleh Suryobroto (2004: 92), sebagai berikut: "Proses pembelajaran yang diikuti terjadinya proses sosialisasi dan pembudayaan serta pengembangan kemampuan yang memungkinkan dapat hidup dalam masyarakat dan mampu memperbaiki kehidupannya". Pengertian ini dapat dijabarkan bahwa mutu pendidikan merupakan pembelajaran untuk menghasilkan siswa yang mempunyai

kemampuan menghadapi masyarakat dan lingkungan sekitarnya, yaitu lingkungan pendidikan, masyarakat, teknologi, dan tututan pengetahuan serta wawasan. Indikator untuk mengukur mutu menurut Nurhasan (1994:390) dan Zamroni (2007:237) terdapat 5 aspek/komponen yakni, (1) Hasil akhir pendidikan, (2) hasil langsung pendidikan, (3) proses pendidikan, (4) instrumen input atau alat interaksi dengan siswa, dan (5) raw input atau siswa dengan lingkungannya.

Di lihat dari lima komponen tersebut diatas nampak selaras dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan pemerintah yang mencakup 8 standar pengelolaan pendidikan, berkaitan dengan komponen hasil akhir bahwa hasil akhir merupakan implementasi dari standar penilaian dan standar kompetensi kelulusan. Sedangkan komponen proses merupakan implementasi dari standar isi, standar proses dan standar sarana prasarana. Instrumen input merupakan implementasi dari standar tenaga kependidikan, standar pembiayaan, dan standar pengelolaan dan raw input merupakan implementasi dari standar proses. Menurut Bafadal (2003 : 20) terdapat lima komponen yang menentukan mutu pendidikan yaitu: (1) kegiatan belajar mengajar; (2) manajemen yang efektif dan efisien; (3) buku dan sarana belajar yang memadai dan selalu dalam kondisi siap pakai; (4) fisik dan penampilan sekolah yang baik dan; (5) partisipasi aktif masyarakat. Keterkaitan lima komponen tersebut tepat kiranya diterapkan sebagai tolok ukur suatu program dalam usaha meningkatkan mutu sekolah.

3. Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan

1. Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah

Menurut Sri Minarti (2012:50), Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) secara bahasa berasal dari tiga kata, yaitu manajemen, berbasis, dan sekolah. Manajemen adalah proses menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Berbasis memiliki kata dasar basis yang berarti dasar atau asas. Sekolah adalah lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat untuk menerima dan memberikan pelajaran. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka MBS dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya yang berasaskan pada sekolah dalam proses pembelajaran. sumber daya yang tersedia di sekolah itu sendiri. Konsep ini menggambarkan adanya perubahan formal struktur penyelenggaraan sekolah sebagai suatu bentuk desentralisasi yang mengidentifikasi sekolah itu sendiri sebagai unit utama peningkatan mutu yang bertumpu pada redistribusi kewenangan pembuatan keputusan.

2. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah

Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah dapat diartikan sebagai suatu proses kerja komunitas sekolah dengan cara menerapkan kaidah-kaidah otonomi, akuntabilitas, partisipasi, dan sustainability untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran secara bermutu (Sudarwan Danim, 2007:33-34). Pernyataan ini, sejalan dengan tiga ketentuan pokok tentang konsep dasar Manajemen Berbasis Sekolah yaitu: 1) Otonomi; 2) Kemandirian dan; 3) Demokratis. Ke tiga konsep dasar MBS ini dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Otonomi, dimaknai sebagai kewenangan sekolah dalam mengatur dan mengurus kepentingan sekolah dalam mencapai tujuan sekolah dan untuk menciptakan mutu pendidikan yang baik.
2. Kemandirian, dimaknai sebagai langkah dalam pengambilan keputusan, tidak tergantung pada birokrasi yang sentralistik dalam mengelola sumber daya yang ada, mengambil kebijakan, mengambil strategi, dan metode dalam memecahkan persoalan yang ada, sehingga mampu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dan dapat memanfaatkan peluang yang ada.

3. Demokratis, dimaknai sebagai keseluruhan elemen-elemen sekolah yang dilibatkan dalam menetapkan, menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan untuk mencapai tujuan sekolah demi memungkinkan tercapainya pengambilan kebijakan yang mendapat dukungan dari seluruh elemen elemen sekolah (Departemen pendidikan nasional, (paket pelatihan 1, Juni 2005).

MBS sebagai suatu model implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan merupakan suatu konsep inovatif, utamanya berkaitan dengan pengelolaan manajemen. Dalam konteks manajemen pendidikan, MBS berpusat pada sumber daya yang tersedia di sekolah itu sendiri. Dengan demikian akan terjadi perubahan paradigma manajemen sekolah yang semula diatur oleh birokrasi di luar sekolah dan bersifat terpusat menuju pengelolaan mandiri yang berbasis pada potensi internal sekolah.

Terdapat tiga pilar dalam MBS, yakni manajemen kepala sekolah, pembelajaran PAKEM dan peran serta. Manajemen sekolah menjadi tanggung jawab bersama dengan stakeholder yang ada di sekolah dengan kepala sekolah sebagai pemimpin dan penanggung jawab sistem. Kegiatan pembelajaran menjadi tanggung jawab guru dan dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa, komite sekolah sebagai mediator sekaligus evaluator berlangsungnya pendidikan di sekolah dan didukung oleh masyarakat sebagai pemberi gagasan, kritik membangun, dukungan pelaksanaan kebijakan pendidikan dan memberi dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

3. Peran Kepala Sekolah dan Guru

a. Peran Kepala Sekolah

Mulyasa (2012:5) menyatakan bahwa kepala sekolah merupakan komponen pendidikan. Sebagai komponen pendidikan kepala sekolah dituntut memiliki keterampilan sebagai manajer yang mampu menyusun program, mengorganisasi, memberdayakan, dan mendayagunakan sumber daya sekolah secara optimal dan profesional, dituntut memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan secara optimal. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah bertanggung jawab atas pengelolaan dan peningkatan mutu pelayanan sekolah, pengelolaan kegiatan sekolah, pembinaan menyeluruh, pemberdayaan dan pemerataan kesempatan tenaga kependidikan, optimalisasi dan pendayagunaan sumber daya.

Menurut Nurcholis (2003), strategi penerapan MBS, akan berhasil jika kepemimpinan sekolah kuat, sehingga mampu menggerakkan dan mendayagunakan setiap

sumber daya sekolah secara efektif. Kepala sekolah menjadi sumber inspirasi atas pembangunan dan pengembangan sekolah secara umum, dituntut berperan aktif sebagai designer, motivator, dan fasilitator. Secara nyata dapat dikatakan maju dan berkembangnya suatu sekolah sangat bergantung pada sikap profesionalisme yang dimiliki kepala sekolah, yakni merencanakan program, mengelola dan meningkatkan mutu pelayanan sekolah, mengelola program supervisi, dan melaksanakan evaluasi untuk peningkatan mutu sekolah, dan mampu mengelola program kewirausahaan untuk dapat mengembangkan sekolah yang dipimpinnya.

b. Peran Guru

Guru merupakan teladan dan panutan langsung bagi peserta didik di kelas dan lingkungan sekolah, oleh karenanya guru perlu mempersiapkan diri dengan segala kewajiban, baik manajemen maupun isi keluasan materi pembelajaran. Kreatifitas dan daya cipta guru dalam melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) perlu terus didorong dan dikembangkan untuk mencapai mutu yang diharapkan.

Sementara itu menurut Depdiknas (2005), peran serta guru dalam pelaksanaan MBS diharapkan mampu meningkatkan kualitas belajar siswa, menyelenggarakan pembelajaran yang efektif dan menyediakan program pengembangan yang diperlukan siswa dan berperan serta dalam memotivasi siswa. Kompetensi guru menjadi hal penting dalam menentukan keberhasilan MBS (Permendiknas No.16 Tahun 2007). Dengan demikian, profesi guru dalam penerapan MBS di sekolah tidak hanya menyampaikan ilmu kepada siswa melainkan guru harus mampu melaksanakan tugas keprofesionalannya dengan berpedoman pada empat kompetensi yang harus dimiliki guru, yakni: (1) kompetensi pedagogik; (2) kompetensi sosial, (3) kompetensi profesional dan (4) kompetensi kepribadian.

c. Peran Komite Sekolah Dan Masyarakat

Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah (Kepmendiknas nomor: 044/U/2002). Pembentukan Komite Sekolah telah ditetapkan dalam keputusan Mendiknas No.044/U/2002 yang juga merupakan amanat dari UU No.25 Tahun 2000-2004, dimana dinyatakan bahwa sasaran yang akan dicapai dalam program

pembinaan pendidikan dasar dan menengah diantaranya adalah terwujudnya manajemen pendidikan yang berbasis sekolah/ masyarakat dengan mengenalkan konsep dan merintis pembentukan Dewan Pendidikan atau pemberdayaan Komite Sekolah di setiap sekolah.

Tujuan dibentuknya komite sekolah (Haryadi, et al, 2006) yaitu: (1). Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan; (2) Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; (3) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan. Dalam pelaksanaan MBS, komite sekolah mempunyai peran sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, dan sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat di sekolah.

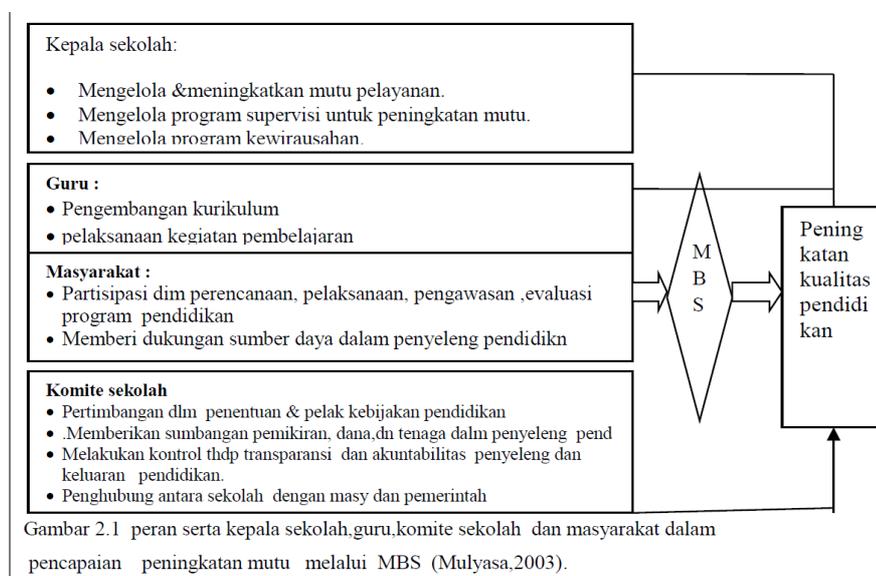
d. Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan, Penyelenggaraan Pendidikan

Perencanaan pendidikan adalah hal yang sangat urgen dalam penyelenggaraan pendidikan. Karena dari sanalah keseluruhan dari pelaksanaan hingga kualitas dan kompetensi output pendidikan ditentukan. Mengingat pendidikan adalah dari masyarakat dan untuk masyarakat, maka partisipasi masyarakat dalam perencanaan sangatlah penting artinya. Perencanaan dimaksud bisa berupa perumusan visi dan misi pendidikan. Dalam perumusan visi misi ini masyarakat sangat penting ikut terlibat untuk menemukan apa sebenarnya yang menjadi persoalan dan kebutuhan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga akan muncul rumusan-rumusan masalah yang nantinya akan dicarikan pemecahan dan solusi lewat perumusan visi dan misi pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan yang tidak diawali dengan partisipasi masyarakat dalam fase perencanaan, maka upaya peningkatan mutu akan lamban dan tidak memuaskan masyarakat.

Penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama sekolah dan masyarakat. Masyarakat dapat berpartisipasi langsung mulai dari penerimaan siswa baru, pengadaan guru, sarana prasarana, dan pengawasan. Dengan keterlibatannya masyarakat dapat mengontrol penyelenggaraan pendidikan. Hal ini disatu sisi bermanfaat untuk mendorong kesungguhan penyelenggara pendidikan agar senantiasa profesional dan berkualitas, sementara disisi yang lain, keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan akan semakin menebalkan rasa memiliki masyarakat terhadap lembaga pendidikan.

e. Peran masyarakat dalam evaluasi pendidikan

Dalam pendidikan, evaluasi merupakan hal yang sangat urgen. Lewat pelaksanaan evaluasi akan diketahui apa saja kelebihan dan kekurangan sekolah. Selanjutnya dilakukan tindak lanjut berupa penanggulangan dan perbaikan terhadap kekurangan dan pengembangan terhadap kelebihan/kekuatan yang ada. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi sangat penting untuk mengetahui secara jelas apa yang kurang dalam penyelenggaraan pendidikan dan apa yang perlu ditingkatkan. Tidak hanya dalam perspektif pengelola pendidikan namun juga dalam perspektif masyarakat sebagai customer. Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Artinya partisipasi masyarakat dalam pendidikan lebih luas, tidak terbatas pada memberi sumbangan pembangunan, tetapi dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Konsep pendekatan mutu pendidikan yang sesuai adalah konsep School Based Management atau Manajemen Berbasis Sekolah, yang menuntut peran serta stakeholder untuk mencapai mutu pendidikan. Gambaran mengenai peran stakeholder untuk mencapai mutu pendidikan melalui MBS, menurut Mulyasa (2003), seperti pada gambar berikut.



Dari skema tersebut di atas dapat dilihat bahwa untuk mencapai mutu pendidikan dibutuhkan peran serta kepala sekolah, guru, masyarakat dan komite sekolah. Masing - masing peran saling mendukung sesuai tugas dan fungsinya sehingga kualitas pendidikan dapat tercapai.

4. Dukungan dan Hambatan dalam Implementasi MBS

Menurut Nurkholis (2003: 264) dalam Muhammad Syaifuddin, ada enam faktor pendukung implementasi MBS. Ke enam faktor pendukung itu antara lain: political will, finansial, sumber daya manusia, budaya sekolah, kepemimpinan, dan keorganisasian. Keberhasilan implementasi MBS tidak terlepas dari dasar hukum implementasi MBS yang tertuang dalam berbagai kebijakan pemerintah (political will). Salah satu contoh dukungan pemerintah dalam pelaksanaan MBS, adalah adanya panduan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS). Dalam pelaksanaan MBS, sering dihadapkan dengan berbagai hambatan, sehingga upaya untuk meningkatkan mutu tidak berjalan efektif. Wohlstetter dan Mohtman(1996)dalam Nurcolis (2003:142-143), menyatakan terdapat empat macam penghambat dalam implementasi MBS,yaitu :

- 1.Penerapan MBS hanya sekedar mengadopsi model apa adanya tanpa upaya kreatif. MBS bukanlah model yang mati mati dan tidak ada ada satu model baku yang biasa diterapkan di semua sekolah. Sekolah harus mengadopsi model MBS sesuai dengan kondisi sekolah dan lingkungannya.
2. Kepala sekolah bekerja berdasarkan agendanya sendiri tanpa memperhatikan aspirasi stakeholder.
3. Kekuasaan pengambilan keputusan berpusat pada satu pihak dan cenderung semena-mena,dengan tidak memperhatikan hakekat dari dari implementasi MBS itu sendiri.
4. Menganggap bahwa MBS adalah hal biasa dengan tanpa usaha yang serius akan berhasil dengan sendirinya.

Dari empat faktor penghambat diatas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan MBS akan terhambat jika seluruh stakeholder tidak bisa bekerja sama untuk mewujudkan tujuan sekolah.

C. PENELITIAN YANG RELAVAN

Penelitian Djoemad Tjiptowardojo (2010) dengan judul disertasi: “Model Strategik Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Swasta” (Penelitian Kualitatif Terhadap Strategi Peningkatan Mutu Universitas Widyatama di Kota Bandung) . Berdasarkan temuan penelitian ini disimpulkan bahwa peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam kerangka otonomi pendidikan tinggi dan globalisasi, dapat dilakukan dengan menerapkan manajemen strategik melalui penerapan strategi-strategi peningkatan mutu dosen dan staf, mutu layanan administrasi/manajemen, dan peningkatan mutu sarana dan prasarana kelembagaan. Temuan penelitian ini berimplikasi pada pentingnya: peningkatan peranan dan dukungan pihak-pihak ‘stakeholders’ lembaga terhadap program peningkatan mutu pendidikan melalui upaya-upaya peningkatan mutu dosen, administrasi/ manajemen lembaga dan sarana-prasarana.

Penelitian Hadi Mansyur (2010) dengan judul tesis “Strategi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan yang Berorientasi pada Kepuasan Siswa” (Analisis Pelayanan Pendidikan pada Siswa Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Bandung), berkesimpulan bahwa peningkatan mutu yang realistis perlu dikembangkan melalui strategi peningkatan mutu yang dipilih untuk diprioritaskan untuk ditingkatkan maupun dipertahankan melalui 5 (Lima) elemen strategi, yaitu: Arena, Vehicle, Differensial, Staging dan Economic Logic. Hasil strategi tersebut dikategorikan ke dalam empat perspektif yaitu: learning and growth, internal process, customer (siswa dan stakeholders) dan financial. Dari visi ke strategi yang menuju action yang dikategorikan ke dalam empat perspektif tersebut, perlu diimplementasikan secara sistem manajemen yang bermutu yang menggunakan standar, hal ini secara sinergistik akan menghasilkan kekuatan mutu maupun penguatan organisasi sekolah yang didasari mutu proses atau perilaku-perilaku yang bermutu. Sehingga dalam menjalankan strategi, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memiliki modal “soft competency”.

Penelitian Ahmad Kosasih (2010) disertasi yang berjudul: “Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan (Strategi Peningkatan Kinerja Kepala Sekolah dan Guru melalui MKKS dan MGMP dalam pembelajaran pada SMP Negeri di Kabupaten Garut), temuan di lapangan dapat dideskripsikan bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, khususnya peningkatan kinerja kepala sekolah dan kinerja guru pada tiga SMP di Kabupaten Garut adalah melalui pemberdayaan Musyawara Kerja Kepala Sekolah (MKKS), dan pemberdayaan Musyawara Guru Mata Pelajaran (MGMP), dalam hal ini MKKS dan MGMP merupakan wadah pembinaan, pusat belajarnya kepala sekolah dan

guru, puast informasi, pusat diklat, seminar, lokakarya, peningkatan kemampuan kepemimpinan, manajerial, proses pembelajaran serta peningkatan kompetensi lainnya. Faktor penghambat diantaranya: (1) Kesadaran guru itu sendiri; (2) Finansial; (3) Sarana prasarana; (4) Letak geografis antara sekolah dengan tempat tinggal. Strategi kepala sekolah dan guru dalam mengatasi hambatan: (1) Meningkatkan motivasi diantara kepala sekolah dan guru; (2) Iuran secara sukarela; (3) Mengoptimalkan MKKS dan MGMP; (4) Menjadikan sekolah-sekolah yang secara sarana prasarana lebih lengkap untuk dijadikan tempat pembinaan; (5) Membentuk keanggotaan MKKS dan MGMP disesuaikan dengan tempat tinggal kepala sekolah dan guru. Rekomendasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Sub Seksi SLTP, para Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan para pengawas, antara lain perlu partisipasi secara optimal dari para pengambil kebijakan dan seluruh elemen pendidik untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Berdasarkan hasil penelitian ke tiga peneliti tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan antara strategi peningkatan mutu dan pelaksanaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) di sekolah.

D. METODOLOGI PENELITIAN

Subyek penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah SMPS Katolik Mater Inviolata Larantuka, yang berkedudukan sebagai pemimpin, bertanggung jawab terhadap pengelolaan manajemen dan pelaksana EMASLIM. Guru yang mempunyai peran sebagai pelaksana pembelajaran yang berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran yang berbasis PAKEM, dan Komite Sekolah yang mempunyai peran sebagai evaluator pelaksanaan pengelolaan manajemen sekolah secara umum serta masyarakat yang berperan sebagai pemberi gagasan, dan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan .

Jenis Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan mendalam terhadap kepala sekolah, mengenai manajemen pengelolaan sekolah, strategi peningkatan mutu pendidikan dengan penerapan MBS; terhadap Guru mengenai kegiatan pelaksanaan pembelajaran yang berbasis PAKEM; terhadap Komite Sekolah mengenai perannya di sekolah. Dan, terhadap Masyarakat .mengenai perannya sebagai mitra/partner dan supporter dalam mendukung peningkatan mutu.

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara, observasi, studi dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap kepala sekolah. Sedangkan observasi dilakukan pengamatan terhadap kepala sekolah, komite sekolah dan masyarakat yang menunjang pendidikan, dan studi dokumentasi untuk mempertajam analisis hasil wawancara dan pengamatan dilakukan kajian dokumen-dokumen yang terdapat di sekolah.

E. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan

Adapun strategi peningkatan mutu pendidikan yang diterapkan di SMPS Katolik Mater Inviolata Larantuka, antara lain:(1). Perencanaan program yang berkelanjutan, 2).Peningkatan mutu akademik dan non akademik,(3) pemberdayaan dan peningkatan profesionalisme guru dan karyawan, (4) pemberdayaan potensi peserta didik,(5). Menjalin kerja sama dengan orang tua dan masyarakat.

2. Menjalin Kerja Sama Dengan Orang Tua Dan Masyarakat.

Kerja sama sekolah dengan orang tua siswa/masyarakat merupakan salah satu tujuan dari implementasi MBS di sekolah. SMPS Katolik Mater Inviolata Larantuka, sejak menerapkan MBS, maka kerja sama sekolah dengan orang tua siswa dan masyarakat mulai digalakan. Bahwa kerja sama sekolah dengan orang tua siswa dan masyarakat dilakukan secara intensif melalui pertemuan rutin setiap awal, tengah dan akhir semester, serta pada saat pelaporan hasil prestasi belajar siswa. Sumbngsi dan kepedulian orang tua siswa terhadap sekolah cukup membantu dan mendukung peningkatan mutu sekolah. Bantuan yang diberikan berupa dana meskipun sedikit dan juga lebih banyak dalam bentuk material untuk penataan lapangan olah raga, pembangunan selasar, pemasangan paving block di lapangan upacara bendera dan kebutuhan lainnya.

Dalam pelaksanaan ke lima strategi peningkatan mutu sekolah yang telah diprogramkan tersebut dilakukan secara simultan karena saling keterkaitan satu dengan lainnya, saling mendukung dan saling melengkapi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan sekolah. Untuk lebih jelas hubungan antara strategi yang diterapkan di sekolah mulai tapel 2014/2015, prestasi yang dicapai: penerapan strategi

peningkatan mutu, juara lomba olimpiade, lulus 100 % selama tiga tahun terakhir, juara lomba solo tunggal, juara pemilihan kepala sekolah, juara lomba guru berprestas, pemasangan paving block, pelebaran lapangan olahraga.

3. Peran Kepala Sekolah dan Guru

Peran kepala sekolah sangatlah penting untuk dilaksanakan terutama untuk menunjang pelaksanaan MBS. Oleh karenanya dalam implementasi MBS kepalasekolah harus mampu berperan sebagai (EMASLIM); educator, manajer, adminis - trator, supervisor, leader, inovator dan motivator pendidikan (Mulyasa , 2007:98).

Adapun kepala sekolah sudah menjalankan semua peran/fungsinya untuk pelaksanaan MBS namun belum semua peran itu berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian (wawancara dan,pengamatan) di lapangan terkait peran kepala sekolah sebagai pendidik dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di SMPS Katolik Mater Inviolata adalah sebagai berikut:

4. Kepala Sekolah Sebagai Educator (Pendidik)

Kepala sekolah adalah tenaga pendidik, berkewajiban memberikan pelayanan berupa bimbingan ataupun pembinaan kepada semua stakeholder. Kepala sekolah dalam mempersiapkan para guru sebelum pelaksanaan pembelajaran di kelas adalah dengan memberikan briefing, dimana guru diarahkan dan dibimbing mengenai pengajaran yang baik. Selain itu untuk peningkatan kualitas guru dalam pengajaran, setiap guru diwajibkan mengikuti diklat, MGMP ataupun kegiatan lainnya. Sebagai pendidik kepala sekolah mengimplementasikan perannya ini melalui pelayanannya terha dap siswa di kelas dengan mengampu 6 jam pembelajaran.

Loyalitas kepala sekolah sebagai edukator adalah sikap tegas kepada sesama pendidik yang dinilai belum disiplin dan kurang maksimal dalam melaksanakan tugas. Dari hasil temuan ini, disimpulkan bahwa kepala sekolah SMPS Katolik Mater Inviolata, telah melaksanakan perannya sebagai edukator dengan baik. Kepala sekolah melakukan pengarahan dan pembinaan dengan mendidik serta melatih guru mela-lui berbagai kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kualitas atau profesio nalitas dalam pelayanan pembelajaran.

5. Kepala Sekolah Sebagai Manajer

Menurut Mulyasa, kepala sekolah sebagai manajer mempunyai peran yang menentukan dalam pengelolaan manajemen sekolah,berhasil tidaknya tujuan sekolah

dapat dipengaruhi bagaimana kepala sekolah menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen tersebut adalah *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (penggerakan), *controlling* (pengontrol).

Kepala sekolah mampu menjalankan peran dan fungsinya sebagai manajer dalam mengelola sekolah. Informasi di lapangan diperoleh sebagai berikut:

1. Kepala sekolah menjalankan fungsi-fungsi manajemen dalam mengelola sekolah, dengan melakukan perencanaan, pengelolaan, melaksanakan, dan mengawasi program di sekolah.
2. Kepala sekolah sebagai manajer membuat perencanaan program, berupa program pengembangan dan program kegiatan sekolah bersama para guru dan staf serta komite sekolah.
3. Pengelolaan program yang dikelola secara teknis oleh kepala sekolah, bersama para kaur/wakil kepala sekolah, meliputi kurikulum dan program pengajaran, kesiswaan, SDM, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan kemasyarakatan.
4. Kontroling dilakukan oleh kepala sekolah yaitu mengontrol berjalannya KBM, pembinaan guru, pembinaan siswa oleh guru dan kegiatan penunjang pembelajaran.

6. Kepala Sekolah Sebagai Administrator

Peran kepala sekolah sebagai administrator, diketahui bahwa kepala SMPS Mater Inviolata Larantuka, telah melaksanakan perannya sebagai berikut:

1. Kepala sekolah dalam pengelolaan manajemen sekolah, selalu tertib administrasi seperti administrasi kurikulum dan pembelajaran, dibuktikan dengan adanya data administrasi proses belajar mengajar seperti; kalender akademik, silabus, program tahunan, program semester, RPP, dan sebagainya selalu dicek/ diteliti dan ditandatangani oleh kepala sekolah.
2. Pembagian tugas pokok ataupun tugas tambahan bagi guru maupun staf, dibuktikan dengan SK (Surat Keputusan) pembagian tugas guru-staf.
3. Kepala sekolah, melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan; masuk dan keluarnya dana dan melakukan pertanggung jawaban setiap anggaran / dana kepada pemerintah maupun yayasan penyelenggara.

Dari hasil temuan ini dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah SMPS Katolik Mater Inviolata Larantuka, telah melaksanakan perannya sebagai administrator, yaitu selalu tertib administrasi dalam setiap bidang tugas.

7. Kepala Sekolah Sebagai Supervisor

Kepala sekolah melakukan tugasnya, sebagai: tim pengembang kurikulum membuat program peren canaan supervisi sebanyak 2 kali yaitu setiap semester 1 kali supervisi. Dalam pelaksanaannya untuk supervisi kelas dibantu oleh 2 orang wakil kepala sekolah, supervisi yang dilakukan kepala sekolah dan timnya meliputi supervisi administrasi, supervisi kelas dan supervisi kinerja /SDM, hasil evaluasi supervisi disampaikan kepada guru secara pribadi untuk perbaikan dan peningkatan terhadap hal-hal yang sudah baik, untuk staf tata usaha juga dilakukan supervisi sesuai dengan tupoksinya, kepala sekolah juga melakukan layanan pengawasan kepada siswa di kelas pada jam pembelajaran yang diampu dan pada saat pembinaan setiap hari sabtu pagi sebelum kegiatan pengembangan diri. Kepala SMPS Mater Inviaota Larantuka, telah melaksanakan perannya sebagai supervisor dengan baik, walaupun masih ada kendala. Permasalahan yang muncul terkait dengan peran kepala sekolah sebagai supervisor yaitu: kurangnya intensitas supervisi untuk proses belajar mengajar di kelas, dirasakan belum maksimal karena supervisi kelas dilaksanakan hanya satu kali saja selama satu semester. Hal ini dirasakan oleh guru dan diakui oleh kepala sekolah.

8. Kepala Sekolah Sebagai Leader (Pemimpin)

Kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan untuk menciptakan perubahan yang paling efektif dalam perilaku kelompok; dan bagi sebagian yang lain, kepemimpinan adalah proses untuk mempengaruhi kegiatan-kegiatan kelompok ke arah penetapan tujuan dan pencapaian tujuan. Kepala sekolah sebagai seorang pemimpin dilihat sebagai seorang yang melakukan perubahan, perubahan tersebut harus dititik beratkan pada perubahan yang positif. Kepemimpinan sangat menentukan keberhasilan sebuah sekolah untuk menjadi lebih baik. Karena pemimpinlah yang akan membawa gerbong sekolah sesuai dengan tujuan atau tidak. Berdasarkan temuan di lapangan dengan informan terhadap peran dan fungsi kepala sekolah sebagai pemimpin adalah sebagai berikut:

1. Kepala sekolah mampu memberdayakan guru-guru dan staf untuk mencapai tujuan sekolah. Hal ini didukung karena karakteristik kepemimpinan kepala sekolah yang diterima oleh guru dan karyawan .
2. Karakteristik kepala sekolah SMPS Mater Inviaota sebagai pemimpin, meliputi: demokratis, memiliki keteladanan, tegas, disiplin, dekat dengan bawahan, mengapresiasi hasil kerja bawahan. Karakter ini cukup membuat guru nyaman.

3. Kepala sekolah dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diprogramkan, yang diberikan oleh dinas terkait maupun oleh yayasan. Keberhasilan ini salah satunya didukung oleh kerja guru dan karyawan.
4. Menjalin komunikasi yang efektif baik antar sesama guru, staf, dan siswa Hasil temuan diatas disimpulkan bahwa kepala sekolah SMPS Mater Invioata, bertanggung jawab dengan tugasnya sebagai seorang pemimpin /leader dalam upaya meningkatkan mutu sekolah.

9. Kepala Sekolah Sebagai Inovator

Sebagai seorang innovator, kepala sekolah harus memiliki cara yang tepat untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh tenaga kependidikan disekolah, dan mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif. Berdasarkan temuan di lapangan (wawancara) terhadap peran dan fungsi kepala sekolah sebagai Inovator adalah seabgai berikut: menemukan gagasan dan inovasi baru, memprogramkan pelatihan-pelatihan, seperti pelatihan metode mengajar bagi guru-guru dan pelatihan IT/ komputer sehingga hampir semua guru bisa mengerjakan perangkat pembelajaran dengan menggunakan laptop /komputer, melengkapi setiap kelas dengan LCD paten untuk proses pembelajaran, meningkatkan prosentase kelulusan, dengan memprogramkan bimbingan intensif bagi siswa dalam rangka menghadapi Ujian Nasional /UN, selalu berkoordinasi dengan Dinas PPO Kabupaten untuk mendapatkan bantuan terutama sarana prasarana.

10. Kepala Sekolah Sebagai Motivator

Kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberikan motivasi kepada para tenaga kependidikan dalam melakukan berbagai tugas dan fungsinya. Motivasi ini dapat ditumbuhkan melalui pengaturan lingkungan fisik, pengaturan suasana kerja, disiplin, dorongan, penghargaan secara efektif dan penyediaan berbagai sumber belajar (E. Mulyasa, 2007:115).

Berdasarkan temuan penelitian di lapangan, penulis menemukan beberapa hal yang dilakukan kepala sekolah dalam menciptakan motivasi bagi semua stake-holder di SMPS Mater Inviolata. Temuan yang didapat adalah sebagai berikut: Kepala sekolah selalu memberi motivasi bagi guru-guru, staf tata usaha untuk mengembangkan diri dan meningkatkan potensinya melalui berbagai kegiatan sekolah maupun diluar sekolah yang mendukung kinerja kerja.

11. Peran Guru

Menurut Depdiknas (2005), peran serta guru dalam pelaksanaan MBS untuk peningkatan mutu sekolah adalah : 1) Guru mampu meningkatkan kualitas belajar siswa, 2) Dapat menyelenggarakan pembelajaran yang efektif, 3) Dapat menyediakan program pengembangan yang diperlukan siswa dan, 4) Berperan dalam memotivasi siswa. Dalam upaya peningkatan mutu di SMPS Mater Inviolata, profesionalisme pelaksanaan peran guru sangat diutamakan. Untuk itu perlu dideskripsikan proses pelaksanaan peran /fungsi Guru di SMPS Mater Inviolata, sebagai berikut :

1). Peran Guru Dalam Meningkatkan Mutu/Kualitas Belajar Siswa

Guru adalah seorang yang berpengalaman dalam bidang profesinya. Dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, ia dapat menjadikan anak didik menjadi orang yang cerdas dan bermutu (Djamara dan Zain, 2015 :280). Guru adalah pribadi yang mampu mengantar setiap siswa menjadi lebih baik dan berkualitas.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan guru, terhadap peran dan fungsinya dalam meningkatkan mutu/kualitas belajar siswa di SMPS Katolik Mater Inviolata Larantuka, terungkap beberapa upaya yang telah dilakukan guru terhadap siswa antara lain, Guru selalu mempersiapkan diri, merencanakan materi pembelajaran secara baik dan kreatif, metode atau pendekatan pembelajaran yang dapat membantu siswa untuk menemukan potensi dirinya sendiri.

Guru juga berusaha menjadi pribadi yang mampu membimbing, memotivasi, dan memberdayakan potensi siswa untuk lebih berprestasi. Guru/pendidik di SMPS Katolik Mater Inviolata, telah berupaya melaksanakan perannya dalam meningkatkan mutu/kualitas belajar siswa, dengan berbagai cara dan pendekatan yang kreatif.

2). Peran Guru Dalam Menyelenggarakan Pembelajaran Yang Efektif

Guru memegang peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Menurut Habel (2015:15). Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status. Apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peran. Guru SMPS Katolik Mater Inviolata, memiliki komitmen untuk menyelenggarakan/melaksanakan pembelajaran yang efektif bagi para siswa. Sebagaimana hasil penelitian di SMPS Katolik Mater Inviolata, melalui wawancara dari dua informan menyatakan bahwa, dalam mencapai pembelajaran yang efektif, maka tugas dan peran yang dilakukan oleh guru, adalah guru merencanakan pembelajaran secara baik yang mengacu pada PAKEM yang disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran. Guru menciptakan suasana kelas yang

hidup, sesuai dengan materi ajar dan hasilnya siswa kreatif dan berani mengemukakan ide atau gagasan mereka. Guru mengelola dan menguasai kelas, memanfaatkan sarana pembelajaran yang mendukung seperti LCD untuk memaksimalkan dan mengefektifkan siswa.

3). Peran Guru dalam Menyediakan Program Pengembangan yang di Perlukan Siswa

Dalam proses belajar mengajar, guru mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing dan memberi fasilitas belajar bagi peserta didik untuk mencapai tujuan. Di dalam pengelolaan pembelajaran di SMPS Katolik Mater Inviolata, guru dituntut untuk menerapkan peran ini sesuai dengan tujuannya, seperti yang disampaikan dua informan (guru) dalam wawancara dengan peneliti, bahwa hal penting yang dilakukan guru adalah: Guru mempersiapkan pembelajaran tidak hanya memperhatikan karakteristik materi pelajaran tetapi juga kemampuan dan apa yang menjadi kebutuhan siswa dalam pembelajaran. Guru berusaha untuk bisa menempatkan diri sebagai sumber belajar, menguasai metode pengajaran yang strategis dan sistematis melalui tahap rancangan, pelaksanaan dan evaluasi dalam konteks kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan kurikulum. Guru memotivasi peserta didik untuk aktif dan kreatif dalam suasana menyenangkan, sehingga memudahkan peserta didik untuk menguasai ilmu pengetahuan. Dalam proses pembelajaran guru berperan sebagai fasilitator, mengembangkan kegiatan-kegiatan yang menarik sehingga kompetensi siswa dapat berkembang secara baik dan efektif.

4.) Peran Guru Dalam Memotivasi Siswa

Secara berkesinambungan guru/pendidik memberikan motivasi dan arahan-arahan positif kepada peserta didik, dengan demikian akan tumbuh semangat dan keberanian dalam diri siswa untuk menjadi lebih baik.

Seorang guru /pendidik memiliki peran utama adalah sebagai motivator bagi para siswa. Guru selaku pendidik harus dapat memfasilitasi, memotivasi serta membimbing siswa untuk senantiasa berusaha meningkatkan kompetensi siswa dalam belajar. Dari hasil temuan peneliti dengan dua informan dinyatakan bahwa semua guru SMPS Katolik Mater Inviolata, memiliki semangat dalam memotivasi para siswa untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Motivasi yang diberikan tidak saja dalam pelaksanaan pembelajaran tetapi juga dalam acara atau kegiatan sekolah lainnya. Siswa yang kurang semangatnya dalam belajar diberikan perhatian melalui home

visit./kunjungan rumah, sehingga siswa termotivasi lagi untuk ke sekolah dan terus semangat dalam belajar.

12. Peran Komite Sekolah dan Masyarakat

Berdasarkan Keputusan Depdiknas (2004;23), keberadaan komite sekolah secara kontekstual berperan sebagai berikut :

1). Sebagai Pemberi pertimbangan (advisory agency)

Peran Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan adalah melakukan koordinasi dengan pihak sekolah, dan memberikan masukan dalam setiap kebijakan yang diambil oleh sekolah. Sasaran pelaksanaan peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan di SMPS Kartolik Mater Inviolata adalah untuk meningkatkan tanggung jawab dan partisipasi dalam mencapai mutu pendidikan secara berimbang. Dalam wawancara dengan dua orang responden, sama-sama menyatakan bahwa keberadaan komite di sekolah ini sebagai pemberi pertimbangan memang diperlukan.

2). Sebagai Pendukung (Supporting Agency)

Peran komite Sekolah sebagai pendukung bukan hanya pendukung dalam bidang finansial saja tetapi lebih pada ide yang lebih inovatif. Fungsi pendukung komite sekolah yang berkaitan dengan internal manajemen sekolah menurut Syaiful Sagala (2009:258), yaitu: (1) mendata jumlah guru serta tingkat pendidikan yang memerlukan pendidikan, latihan, dan peningkatan kualifikasi pendidikan; (2) mendukung program pengayaan bagi siswa yang telah mencapai KKM atau lebih, dan remedial bagi siswa yang belum mencapai KKM; (3) menyediakan penghargaan dan hadiah bagi siswa yang berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non akademik.

3). Sebagai Pengontrol (controlling agency)

Sebagaimana Komite sekolah di SMPS Mater Inviolata Larantuka, juga berperan sebagai pengontrol dalam pengelolaan manajemen peningkatan mutu sekolah. Kontrol atau pengawasan yang dilakukan komite selama ini di SMPS Mater Inviolata Larantuka, antara lain komite melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan yang telah diputuskan bersama, melakukan pengawasan atas pelaksanaan program kegiatan sekolah.

Selain itu komite sekolah juga berperan serta dalam rangka transparansi penggunaan alokasi dana pendidikan termasuk dalam mengawasi penggunaan dana

bantuan dari pusat yang mengalir ke sekolah agar lebih dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan dana baik yang berasal dari masyarakat maupun pemerintah dapat benar-benar efektif dan termonitor alokasinya, apakah sesuai dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang diajukan satuan pendidikan/ sekolah.

13. Sebagai Mediator (Mediator Agency)

Menurut Hasbullah (2007: 90) pada dasarnya posisi komite sekolah berada di tengah-tengah antara orang tua murid, murid, guru, masyarakat setempat dan pihak-pihak lain yang terkait dengan sekolah. Posisi tersebut menjadikan komite sekolah memiliki tanggung jawab untuk menghubungkan berbagai pihak yang sama-sama memiliki kepentingan pada lembaga sekolah.

SMPS Katolik Mater Inviolata Larantuka, dalam upaya peningkatan mutu sekolah, selalu bersinergi dengan pihak luar sekolah. Oleh karena itu sangat mendukung peran dan tugas dari komite sekolah. Peran komite SMPS Katolik Mater Inviolata Larantuka sebagai mediator selama ini antara lain berperan sebagai penampung aspirasi masyarakat dalam hal pengaduan dan keluhan terhadap kebijakan dan program sekolah. Keluhan atau input itu akan diteruskan komite sekolah kepada pimpinan sekolah untuk didiskusikan bersama dewan guru untuk pembenahan kembali. Komite sekolah juga menjadi penghubung antara orang tua murid dan masyarakat yang peduli dengan pendidikan.

1). Peran masyarakat dalam perencanaan pendidikan

Perencanaan pendidikan adalah hal yang sangat urgen dalam penyelenggaraan pendidikan. Karena dari sanalah keseluruhan dari pelaksanaan hingga kualitas dan kompetensi output pendidikan ditentukan.

Hasil proses realisasi peran masyarakat dalam perencanaan pendidikan, di SMPS Katolik Mater Inviolata. Hasil temuan dari dua informan, mengungkapkan bahwa sekolah belum melibatkan masyarakat secara langsung dalam merencanakan program sekolah. Sekolah yang memprogramkan kegiatan dan selanjutnya mengundang orang tua melalui rapat bersama dewan guru dan komite untuk mensosialisasikan program-program kegiatan sekolah yang sudah direncanakan.

2). Peran masyarakat dalam penyelenggaraan program sekolah

Program sekolah yang sudah direncanakan harus dilaksanakan secara partisipatif oleh seluruh stakeholder sekolah (kepala sekolah, guru, staf tata usaha, komite sekolah, siswa dan masyarakat). Pelaksanaan peran serta masyarakat

dalamn penyelenggaraan/pelaksanaan program sekolah di SMPS Katolik Mater Inviolata dapat diketahui melalui ungkapan kepala sekolah dan guru SMPS Mater Inviolata,bahwa didalam pelaksanaan program sekolah pihak sekolah selalu melibatkan peran serta masyarakat untuk mendukung dan melancarkan pelak sanaan program kegiatan. Masyarakat/orang tua juga senantiasa terbuka untuk berpartisipasi sejauh kemampuan, bahkan terlibat langsung dalam menangani pelaksanaan kegiatan di sekolah. Sebagai contoh dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler latihan musik dan drum band tidak saja guru yang mendampingi siswa tetapi juga pelatih dari luar sekolah (masyarakat) yang berkompeten secara sukarela terlibat menjadi pelatih dan pendamping siswa dalam kegiatan sekolah tersebut. Sedangkan dukungan lain dari orang tua adalah memotivasi dan memfasilitasi anak-anaknya untuk selalu mengikuti segala kegiatan sekolah.

3). Peran masyarakat dalam mengevaluasi pendidikan

Dalam pendidikan, evaluasi merupakan hal yang sangat urgen. Dari evaluasi ini, diharapkan dapat tergambar seluruh aktifitas yang dilakukan sekolah dalam rangka menjalankan program-programnya. Lewat pelaksanaan evaluasi akan diketahui apa saja kelebihan dan kekurangan yang ada. Selanjutnya akan ada tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut. SMPS Katolik Mater Inviolata memandang kegiatan evaluasi itu sangat penting.

Partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sekolah itu penting, namun hal ini sekolah belum memberi kesempatan kepada masyarakat /orang tua siswa untuk terlibat dalam evaluasi. Orang tua hanya memberikan masukan mengenai pelaksanaan program sekolah secara lisan atau secara langsung kepada kepala sekolah atau ketua komite.

4). Dukungan dan Hambatan dalam Implementasi MBS

a. Peran Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Pendidik dan tenaga kependidikan ,adalah komponen sekolah yang memiliki peran penting dan strategis dalam peningkatan mutu sekolah. Berdasarkan temuan di lapangan lewat wawancara dan pengamatan yang dilaku kan penulis dengan informan sehubungan dengan pelaksanaan peran pendidik dan tenaga kependidik SMPS Katolik Mater Inviolata Larantuka dapat dikatakan baik,semua stakeholder merasa memiliki sekolah baik itu PNS maupun non PNS. Hal ini terwujud dalam sikap tanggung jawab dan kedisiplinan dalam melaksa nakan tugas. Hal ini didasarkan pada rasa memiliki

sekolah dan komitmen yang sama untuk peningkatan mutu sekolah. Kepala sekolah bersama stakeholder melaksanakan peran dan tugas dengan baik karena ada rasa memiliki, adanya tanggung jawab terhadap sekolah sehingga kompak didalam setiap pelaksanaan kegiatan sekolah.

b. Dukungan Pemerintah

Bentuk dukungan pemerintah di SMPS Mater Inviolata Larantuka, berupa dukungan financial /dana termasuk bantuan sarana prasarana.

Kepala sekolah, dalam wawancara mengungkapkan bahwa SMPS Mater Inviolata, menadapat dukungan dari pemerintah, berupa dana BOS dan penempatan guru-guru PNS yang semuanya sudah tersertifikasi. Dukungan ini dirasakan sangat membantu sekolah, dalam meringankan beban biaya/anggaran untuk kesejahteraan guru. Sebagai sekolah swasta sebagian besar guru yang ada di sekolah ini adalah guru yayasan dan guru honorer termasuk staf administrasi sekolah, yang tentunya membutuhkan finansial yang besar jumlahnya. Pernyataan ini diperkuat oleh informan lainnya bahwa selain dana BOS, pemerintah juga membantu siswa miskin melalui pemberian bea siswa miskin(BSM) dan sarana prasaran untuk alat-alat praktik di lab IPA .

5). Hambatan Dalam Implementasi MBS

a. Kekurangan personil baik guru maupun staf administrasi

Dalam implementasi program manajemen berbasis sekolah juga menemui hambatan baik internal maupun eksternal. Ada beberapa hambatan antara lain : masih kekurangan personil baik guru maupun staf tata usaha dan sarana prasarana yang belum memadai. Sebagaimana diungkapkan oleh kepala sekolah, bahwa SMPS Mater Inviolata, masih kekurangan guru maupun staf. Kondisi ini menyebabkan kelebihan jam mengajar pada guru mata pelajaran tertentu. Sedangkan tugas administrasi keuangan dibebankan kepada guru. Hal senada disampaikan guru dan komite sekolah, mereka mengatakan bahwa kekurangan yang ada sekarang ini menantang mereka untuk tetap berpartisipasi, terbuka menerima dan menjalankan tugas yang ada.

b. Sarana prasarana yang belum terpenuhi

Sarana prasarana sekolah yang belum terpenuhi adalah ruang UKS, rumah

Satpam, lapangan bola kaki dan sarana penunjang pembelajaran seperti alat musik masih terbatas sehingga siswa saat melakukan praktek tidak serempak. Sekolah dan komite tetap berupaya untuk membenahi kekurangan ini dengan dana yang dialokasikan sambil terus mencari donatur luar (masyarakat) untuk membantu. Dari hasil penemuan diatas dapat disimpulkan bahwa sarana prasarana di SMPS Mater Inviolata, belum semua terpenuhi butuh pembenahan berkelanjutan. Dana bisa diusahakan melalui masyarakat atau orang tua siswa yang peduli pendidik.

F. KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Melakukan perencanaan, peningkatan mutu, penyusunan program sekolah berkelanjutan pada setiap tahun pelajaran berupa Rencana Pengembangan Sekolah (RPS), (RENSTRA), RKAS; yang menjadi acuan pelaksanaan program pendidikan.
- b. Pemberdayaan dan peningkatan profesionalisme guru dan staf, melalui pelaksanaan program sekolah, seminar dan pelatihan pengembangan profesi;
- c. Pemberdayaan potensi peserta didik, adanya tambahan jam pembelajaran, pendampingan belajar, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler;
- d. Menjalin kerja sama dengan orang tua siswa/masyarakat melalui pertemuan rutin setiap awal, tengah dan akhir semester. Bentuk partisipasi dinyatakan melalui pemberian bantuan dana, material ,
- e. Kepala sekolah sebagai pembina, melatih guru melalui berbagai pelatihan, sikap tegas kepada pendidik yang belum disiplin, melakukan perencanaan dan pengembangan program sekolah, pengelolaan program melibatkan kaur/wakil kepala sekolah, tertib administrasi setiap bidang tugas, pengelolaan dan pelaporan keuangan.
- f. Kepala sekolah sebagai supervisor membuat program supervisi guru meliputi supervisi administrasi, kelas dan supervisi kinerja, bagaimana cara memberdayakan guru dan staf melalui kepemimpinan yang demokratis, tegas, disiplin, komunikasi yang efektif, melakukan inovasi baru, pelatihan metode mengajar, pelatihan IT, bimbingan intensif bagi siswa dan memotivasi guru, staf untuk berkarya.
- g. Peran Komite Sekolah, terealisasi dalam memberikan pertimbangan terhadap penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya, mengawasi pelayanan pendidikan terutama sarana prasarana dan ketenagaan, menindak lanjuti aspirasi masyarakat/orang tua siswa.

- h. Dukungan dalam implementasi MBS, adalah situasi lingkungan sekolah yang kondusif memungkinkan seluruh proses pendidikan terlaksana dengan baik dan lancar, peran tenaga pendidik dan kependidikan yang terbuka, siap menerima dan melaksanakan tugas, kompak dalam pelaksanaan program sekolah.

2. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka tindakan penyebaran informasi dapat dilakukan melalui :

- a. Kegiatan Seminar bagi kepala sekolah dan para guru/pendidik, untuk menambah dan mempertajam pengetahuan mereka tentang berbagai strategi penting yang dapat dilakukan untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Selain itu juga lebih profesional dan inovatif dalam mengimplementasikan perannya sebagai pendidik.
- b. Melakukan sosialisasi kepada komite sekolah dan masyarakat/orang tua siswa, agar semakin memahami peran dan tanggung jawab mereka sehingga dapat berpartisipasi secara aktif bersama sekolah dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di sekolah.
- c. Publikasi lewat media; website sekolah atau artikel, agar dapat dibaca dan diketahui oleh masyarakat pada umumnya sehingga semakin peduli terhadap pendidikan, karena upaya peningkatan mutu di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama.

3. Saran

- a. Bagi Kepala Sekolah, hendaknya kepala sekolah bersama stakeholder dapat membentuk tim khusus untuk mengevaluasi dan menilai secara berkala pelaksanaan setiap strategi di sekolah sehingga lebih efektif untuk meningkatkan mutu sekolah, dan diharapkan pula agar kepala sekolah semakin lebih intensif mengimplementasikan setiap peran dalam sehingga mutu sekolah terus meningkat.
- b. Bagi Guru, hendaknya guru lebih kreatif dan inovatif untuk mengimplementasikan setiap peran dalam meningkatkan mutu belajar siswa melalui pembelajaran efektif berbasis PAKEM, serta merencanakan program pengembangan bagi siswa yang baik, dan kreatif.
- c. Bagi Komite Sekolah, hendaknya lebih memahami seluruh peran dan tugas-tugasnya dengan baik, sehingga dapat mengimplementasikannya secara optimal dalam seluruh aspek pengelolaan sekolah, dalam memberikan pertimbangan sebagai penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, menggalang dana dan

sum berdaya pendidikan lainnya dari masyarakat ataupun pemangku kepentingan lainnya, mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah; menindak lanjuti keluhan, saran, kritik dan aspirasi masyarakat.

- d. Bagi Masyarakat/orang tua, hendaknya semakin terbuka untuk mendukung sekolah dengan berpartisipasi secara optimal dalam penyelenggaraan pendidikan di SMPS Katolik Mater Inviolata, baik melalui ide atau gagasan-gagasan konstruktif, sumbangan secara langsung ataupun tidak langsung, dana atau tenaga demi peningkatan mutu sekolah dan pendidikan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Dzaujak, 1996, Petunjuk Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar, Jakarta, Depdikbud
- Arikunto, Suarsimi, 2012, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, Ed. 2-Jakarta: Bumi Aksara
- Djoemad, Tjiptowardojo. 2010. Model Stratejik Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Swasta” (Penelitian Kualitatif Terhadap Strategi Peningkatan Mutu Universitas Widyatama di Kota Bandung) disertasi.
- Dwiningrum Siti Irene Astuti, (2015), Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar;
- Fattah, 2004: Konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah . Bandung : Pustaka Bani Quraisy.
- Hasbullah, (2010), Otonomi Pendidikan, Jakarta, Rajawali Pers;
- Kosasih, Ahmad. 2010. Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan (Strategi Peningkatan Kinerja Kepala Sekolah dan Guru melalui MKKS dan MGMP dalam pembelajaran pada SMP Negeri di Kabupaten Garut). Surakarta : UMS
- Machali Kurniadin, 2012. Manajemen Pendidikan, Konsep dan Prinsip Pengelolaan Pendidikan, Yogyakarta : ARUZZ Media.
- Mulyasa E. 2003, Manajemen Berbasis Sekolah, Bandung : Remaja Rosdakarya
- , 2006. Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif Dan Menyenangkan, Bandung Remaja Rosdakarya